

**DAFTAR ISIAN**  
**TINGKAT PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN**

Desa: GANDIS HULU  
Kecamatan: Dedai  
Kabupaten: KAB. SINTANG  
Provinsi: KALIMANTAN BARAT  
Bulan: 6  
Tahun: 2022

Nama Pengisi: HAMBALI  
Pekerjaan: PERANGKAT DESA  
Jabatan: SEKRETARIS DESA  
Kepala Desa / Lurah: AHMAD USTOHORI  
SUMBER DATA YANG DIGUNAKAN  
UNTUK MENGISI PROFIL  
DESA/KELURAHAN  
Referensi 1 : PERDA KAB. SINTANG NO. 16 TAHUN 2011  
Referensi 2:  
Referensi 3:  
Referensi 4:

**I. PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN**

| <b>A. Jumlah Penduduk</b>  |               |           |  |
|----------------------------|---------------|-----------|--|
| Jumlah                     | Jenis Kelamin |           |  |
|                            | Laki-laki     | Perempuan |  |
| Jumlah penduduk tahun ini  | 465 orang     | 429 orang |  |
| Jumlah penduduk tahun lalu | 435 orang     | 420 orang |  |
| Persentase perkembangan    | 6.9 %         | 2.14 %    |  |

  

| <b>B. Jumlah Keluarga</b>         |              |              |              |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Jumlah                            | KK Laki-laki | KK Perempuan | Jumlah Total |
| Jumlah Kepala Keluarga tahun ini  | 230 KK       | 25 KK        | 255 KK       |
| Jumlah Kepala Keluarga tahun lalu | 251 KK       | 16 KK        | 267 KK       |
| Prosentase Perkembangan           | -8.37 %      | 56.25 %      |              |

**II. EKONOMI MASYARAKAT**

| <b>A. Pengangguran</b>                                                   |           |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Jumlah angkatan kerja (penduduk usia 18-56 tahun)                     | 247 orang |
| 2. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang masih sekolah dan tidak bekerja | 9 orang   |
| 3. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang menjadi ibu rumah tangga        | 250 orang |
| 4. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja penuh                   | 230 orang |
| 5. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja tidak tentu             | 15 orang  |
| 6. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan tidak bekerja         | 0 orang   |
| 7. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan bekerja               | 2 orang   |

  

| <b>B. Kesejahteraan Keluarga</b>    |              |
|-------------------------------------|--------------|
| 1. Jumlah keluarga prasejahtera     | 90 keluarga  |
| 2. Jumlah keluarga sejahtera 1      | 129 keluarga |
| 3. Jumlah keluarga sejahtera 2      | 20 keluarga  |
| 4. Jumlah keluarga sejahtera 3      | 10 keluarga  |
| 5. Jumlah keluarga sejahtera 3 plus | 6 keluarga   |
| 6. Total jumlah kepala keluarga     | 255 keluarga |

**III. PRODUK DOMESTIK DESA/KELURAHAN BRUTO**

| <b>A. SUBSEKTOR PERTANIAN</b> |                    |                         |                     |                      |                  |                 |                    |
|-------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| Tanaman                       | Luas Produksi (Ha) | Hasil Produksi (Ton/Ha) | Nilai produksi (Rp) | Biaya pemupukan (Rp) | Biaya bibit (Rp) | Biaya obat (Rp) | Biaya lainnya (Rp) |
| Padi ladang                   | 3                  | 1.5                     | 49500000            | 0                    | 0                | 0               | 2520000            |
|                               |                    |                         |                     |                      |                  |                 |                    |

| B. SUBSEKTOR PERKEBUNAN |                    |                         |                     |                      |                  |                 |                    |
|-------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| Tanaman                 | Luas Produksi (Ha) | Hasil Produksi (Ton/Ha) | Nilai produksi (Rp) | Biaya pemupukan (Rp) | Biaya bibit (Rp) | Biaya obat (Rp) | Biaya lainnya (Rp) |
| Karet                   | 150                | 0.5                     | 450000000           | 0                    | 0                | 0               | 20000000           |
|                         |                    |                         |                     |                      |                  |                 |                    |

| C. SUBSEKTOR PETERNAKAN |                |                     |                                    |                                        |                      |
|-------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|
| Jenis Produksi          | Hasil Produksi | Nilai produksi (Rp) | Nilai Bahan Baku yg digunakan (Rp) | Nilai Bahan Penolong yg digunakan (Rp) | Jumlah Ternak (Ekor) |
|                         |                |                     |                                    |                                        |                      |

| D. SUBSEKTOR PERIKANAN |                            |                     |                                    |                                        |                                         |                       |
|------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
| Jenis Produksi         | Hasil Produksi (Ton/Tahun) | Nilai produksi (Rp) | Nilai Bahan Baku yg digunakan (Rp) | Nilai Bahan Penolong yg digunakan (Rp) | Total biaya antara yang dihabiskan (Rp) | Jenis usaha perikanan |
|                        |                            |                     |                                    |                                        |                                         |                       |

| E. SEKTOR PERTAMBANGAN DAN GALIAN                         |          |
|-----------------------------------------------------------|----------|
| Total nilai produksi tahun ini                            | Rp. 0,00 |
| Total nilai bahan baku yang digunakan                     | Rp. 0,00 |
| Total nilai bahan penolong yang digunakan                 | Rp. 0,00 |
| Total biaya antara yang dihabiskan                        | Rp. 0,00 |
| Jumlah total jenis bahan tambang dan galian yang ada      | 0 jenis  |
|                                                           |          |
| F. SUBSEKTOR KERAJINAN                                    |          |
| Total nilai produksi tahun ini                            | Rp. 0,00 |
| Total nilai bahan baku yang digunakan                     | Rp. 0,00 |
| Total nilai bahan penolong yang digunakan                 | Rp. 0,00 |
| Total biaya antara yang dihabiskan                        | Rp. 0,00 |
| Total jenis kerajinan rumah tangga                        | 0 jenis  |
|                                                           |          |
| G. SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN                             |          |
| G.1. Subsektor Industri Pangan                            |          |
| Total nilai produksi tahun ini                            | Rp. 0,00 |
| Total nilai bahan baku yang digunakan                     | Rp. 0,00 |
| Total nilai bahan penolong yang digunakan                 | Rp. 0,00 |
| Total biaya antara yang dihabiskan                        | Rp. 0,00 |
| Total jumlah jenis industri tsb yang ada                  | 0 jenis  |
|                                                           |          |
|                                                           |          |
| H. SUBSEKTOR KEHUTANAN                                    |          |
| Total nilai produksi tahun ini                            | Rp. 0,00 |
| Total nilai bahan baku yang digunakan                     | Rp. 0,00 |
| Total nilai bahan penolong yang digunakan                 | Rp. 0,00 |
| Total biaya antara yang dihabiskan                        | Rp. 0,00 |
|                                                           |          |
| I. SEKTOR PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN                 |          |
| I.1. Subsektor Perdagangan Besar                          |          |
| Total nilai transaksi                                     | Rp. 0,00 |
| Total nilai aset perdagangan yang ada                     | Rp. 0,00 |
| Total jumlah jenis perdagangan besar                      | Rp. 6,00 |
| Total nilai biaya yang dikeluarkan                        | Rp. 0,00 |
| Total biaya antara lainnya                                | Rp. 0,00 |
|                                                           |          |
| I.2. Subsektor Perdagangan Eceran                         |          |
| Jumlah total jenis perdagangan eceran                     | 0 jenis  |
| Total nilai transaksi                                     | Rp. 0,00 |
| Total nilai biaya yang dikeluarkan                        | Rp. 0,00 |
| Total nilai aset perdagangan eceran                       | Rp. 0,00 |
|                                                           |          |
| I.3. Subsektor Hotel                                      |          |
| Jumlah total penginapan dan penyediaan akomodasi yang ada | 0 jenis  |

|                                                                  |                    |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Jumlah total pendapatan                                          | Rp. 0,00           |
| Jumlah total biaya pemeliharaan                                  | Rp. 0,00           |
| Jumlah biaya antara yang dikeluarkan                             | Rp. 0,00           |
| Jumlah total pendapatan yang diperoleh                           | Rp. 0,00           |
|                                                                  |                    |
| <b>I.4. Subsektor Restoran</b>                                   |                    |
| Jumlah tempat penyediaan konsumsi                                | 0 Unit             |
| Biaya konsumsi yang dikeluarkan                                  | Rp. 0,00           |
| Biaya antara lainnya                                             | Rp. 0,00           |
| Jumlah total pendapatan yang diperoleh                           | Rp. 0,00           |
|                                                                  |                    |
| <b>J. Sektor Bangunan/Konstruksi</b>                             |                    |
| Jumlah bangunan yang ada tahun ini                               | 5 unit             |
| Biaya pemeliharaan yang dikeluarkan                              | Rp. 0,00           |
| Total nilai bangunan yang ada                                    | Rp. 300.000.000,00 |
| Biaya antara lainnya                                             | Rp. 0,00           |
|                                                                  |                    |
| <b>K. Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan</b>         |                    |
| <b>K.1. Subsektor Bank</b>                                       |                    |
| Jumlah transaksi perbankan                                       | Rp. 0,00           |
| Jumlah nilai transaksi perbankan                                 | Rp. 0,00           |
| Jumlah biaya yang dikeluarkan                                    | Rp. 0,00           |
|                                                                  |                    |
| <b>K.2. Subsektor lembaga keuangan bukan bank</b>                |                    |
| Jumlah lembaga keuangan bukan bank                               | 0 Unit             |
| Jumlah kegiatan jasa penunjang lembaga keuangan bukan bank       | 0 Jenis            |
| Nilai transaksi lembaga keuangan bukan bank                      | Rp. 0,00           |
| Biaya yang dikeluarkan                                           | Rp. 0,00           |
|                                                                  |                    |
| <b>K.3. Subsektor Sewa Bangunan</b>                              |                    |
| Jumlah usaha persewaan bangunan dan tanah                        | 0 unit             |
| Total nilai persewaan yang dicapai                               | Rp. 0,00           |
| Biaya yang dikeluarkan                                           | Rp. 0,00           |
| Biaya lainnya                                                    | Rp. 0,00           |
|                                                                  |                    |
| <b>K.4. Subsektor Jasa Perusahaan</b>                            |                    |
| Jumlah perusahaan jasa                                           | 0 Jenis            |
| Nilai transaksi perusahaan jasa                                  | Rp. 0,00           |
| Biaya yang dikeluarkan                                           | Rp. 0,00           |
| Biaya lainnya                                                    | Rp. 0,00           |
|                                                                  |                    |
| <b>L. SEKTOR JASA-JASA</b>                                       |                    |
| <b>L.1. Subsektor jasa pemerintahan umum</b>                     |                    |
| Jumlah jenis jasa pelayanan pemerintahan kepada masyarakat       | 0 unit             |
| Nilai transaksi pelayanan pemerintahan kepada masyarakat         | Rp. 0,00           |
| Biaya yang dikeluarkan dalam pelayanan                           | Rp. 0,00           |
|                                                                  |                    |
| <b>L.2. Subsektor jasa swasta</b>                                |                    |
| Jumlah usaha jasa pelayanan sosial yang disediakan masyarakat    | 0 jenis            |
| Nilai aset produksi jasa pelayanan sosial                        | Rp. 0,00           |
| Biaya yang dikeluarkan                                           | Rp. 0,00           |
|                                                                  |                    |
| <b>L.3. Subsektor Jasa hiburan dan rekreasi</b>                  |                    |
| Jumlah jenis jasa hiburan dan rekreasi                           | 0 jenis            |
| Nilai transaksi usaha jasa hiburan dan rekreasi                  | Rp. 0,00           |
| Biaya antara yang dikeluarkan                                    | Rp. 0,00           |
|                                                                  |                    |
| <b>L.4. Subsektor Jasa Perorangan dan Rumah Tangga</b>           |                    |
| Jumlah jenis kegiatan jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga | 0 jenis            |
| Nilai aset jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga            | Rp 0,00            |
| Nilai transaksi jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga       | Rp 0,00            |
| Biaya antara yang dikeluarkan                                    | Rp 0,00            |
|                                                                  |                    |

|                                                                                                                                               |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>M. SEKTOR ANGKUTAN DAN KOMUNIKASI</b>                                                                                                      |         |
| <b>M.1. Subsektor Angkutan</b>                                                                                                                |         |
| Jumlah jenis kegiatan pengangkutan orang dan barang dengan alat angkut kendaraan jalan raya, laut, rel, udara, dan sungai/danau/penyeberangan | Jenis   |
| Jumlah total kendaraan angkutan                                                                                                               | Unit    |
| Nilai total transaksi pengangkutan                                                                                                            | Rp 0,00 |
| Nilai total biaya yang dikeluarkan                                                                                                            | Rp 0,00 |
| <b>N. SEKTOR LISTRIK, GAS &amp; AIR MINUM</b>                                                                                                 |         |
| <b>N.1. Subsektor Listrik</b>                                                                                                                 |         |
| Jumlah jenis kegiatan pembangkitan dan penyaluran tenaga listrik                                                                              | Jenis   |
| Jumlah nilai produksi listrik                                                                                                                 | Rp 0,00 |
| Jumlah total nilai transaksi                                                                                                                  | Rp 0,00 |
| Jumlah biaya antara yang dikeluarkan                                                                                                          | Rp 0,00 |
| <b>N.2. Subsektor Gas</b>                                                                                                                     |         |
| Jumlah kegiatan penyediaan gas                                                                                                                | jenis   |
| Nilai aset produksi gas                                                                                                                       | Rp 0,00 |
| Nilai transaksi                                                                                                                               | Rp 0,00 |
| Biaya antara yang dikeluarkan                                                                                                                 | Rp 0,00 |
| <b>N.3. Subsektor Air Minum</b>                                                                                                               |         |
| Jumlah jenis kegiatan penyediaan dan penyaluran air minum                                                                                     | jenis   |
| Nilai aset penyediaan air minum                                                                                                               | Rp 0,00 |
| Nilai produksi air minum                                                                                                                      | Rp 0,00 |
| Nilai transaksi air minum                                                                                                                     | Rp 0,00 |
| Biaya antara yang dikeluarkan                                                                                                                 | Rp 0,00 |

#### IV. PENDAPATAN PERKAPITA

##### A. Pendapatan perkapita menurut sektor usaha

|                                                                               |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>A.1. Industri kecil, menengah dan besar</b>                                |                 |
| 1. Jumlah rumah tangga                                                        | 15 Keluarga     |
| 2. Jumlah total anggota rumah tangga                                          | 619 orang       |
| 3. Jumlah rumah tangga buruh tani                                             | 215 Keluarga    |
| 4. Jumlah anggota rumah tangga buruh                                          | 200 orang       |
| 5. Jumlah pendapatan perkapita dari sektor tersebut untuk setiap rumah tangga | Rp 2.000.000,00 |

|                                                      |                 |
|------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>B. PENDAPATAN RILL KELUARGA</b>                   |                 |
| Jumlah Kepala Keluarga                               | 255 KK          |
| Jumlah Anggota Keluarga                              | 894 orang       |
| Jumlah Pendapatan Kepala Keluarga                    | Rp 1.200.000,00 |
| Jumlah pendapatan dari anggota keluarga yang bekerja | Rp 1.000.000,00 |

#### V. STRUKTUR MATA PENCAHARIAN MENURUT SEKTOR

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| <b>1. Sektor Pertanian</b>     |           |
| Petani                         | 230 orang |
| Buruh Tani                     | 15 orang  |
| Pemilik Usaha Tani             | 5 orang   |
| <b>2. Sektor Perkebunan</b>    |           |
| Karyawan Perusahaan Perkebunan | 2 orang   |
| Buruh perkebunan               | 0 orang   |
| Pemilik usaha Perkebunan       | 0 orang   |
| <b>3. Sektor Peternakan</b>    |           |
| Peternakan Perorangan          | 6 orang   |
| Buruh Usaha Peternakan         | 0 orang   |
| Pemilik Usaha Peternakan       | 0 orang   |

|                                                              |         |
|--------------------------------------------------------------|---------|
| <b>4. Sektor Perikanan</b>                                   |         |
| Nelayan                                                      | 0 orang |
| Buruh Usaha Perikanan                                        | 0 orang |
| Pemilik Usaha Perikanan                                      | 3 orang |
| <b>5. Sektor Kehutanan</b>                                   |         |
| Pengumpul Hasil Hutan                                        | 0 orang |
| Buruh Usaha Pengolahan Hasil Hutan                           | 0 orang |
| Pemilik Usaha Pengolahan Hasil Hutan                         | 0 orang |
| <b>6. Sektor Pertambangan dan Bahan Galian C</b>             |         |
| Penambang Galian C Perorangan                                | 0 orang |
| Buruh Usaha Pertambangan                                     | 0 orang |
| Pemilik Usaha Pertambangan                                   | 0 orang |
| <b>7. Sektor Industri Kecil &amp; Kerajinan Rumah Tangga</b> |         |
| <b>8. Sektor Industri Menengah dan Besar</b>                 |         |
| Karyawan perusahaan swasta                                   | 3 orang |
| Karyawan perusahaan pemerintah                               | 1 orang |
| <b>9. Sektor Perdagangan</b>                                 |         |
| Karyawan Perdagangan Hasil Bumi                              | 0 orang |
| Buruh Perdagangan Hasil Bumi                                 | 0 orang |
| Pengusaha Perdagangan Hasil Bumi                             | 0 orang |
| <b>10. Sektor Jasa</b>                                       |         |
| Pemilik usaha warung, rumah makan dan restoran               | 4 orang |
| Pegawai Negeri Sipil                                         | 5 orang |
| Sopir                                                        | 1 orang |
| Jasa penyewaan peralatan pesta                               | 1 orang |

## VI. PENGUASAAN ASET EKONOMI MASYARAKAT

|                                                        |                 |
|--------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>A. ASET TANAH</b>                                   |                 |
| Tidak memiliki tanah                                   | 0 orang         |
| Memiliki tanah antara 0,1-0,2 ha                       | 0 orang         |
| Memiliki tanah antara 0,21-0,3 ha                      | 0 orang         |
| Memiliki tanah antara 0,31-0,4 ha                      | 0 orang         |
| Memiliki tanah antara 0,41-0,5 ha                      | 0 orang         |
| Memiliki tanah antara 0,51-0,6 ha                      | 0 orang         |
| Memiliki tanah antara 0,61-0,7 ha                      | 0 orang         |
| Memiliki tanah antara 0,71-0,8 ha                      | 0 orang         |
| Memiliki tanah antara 0,81-0,9 ha                      | 0 orang         |
| Memiliki tanah antara 0,91-1,0 ha                      | 0 orang         |
| Memiliki tanah antara 1,0 – 5,0 ha                     | 0 orang         |
| memiliki tanah antara 5,0 – 10 ha                      | 0 orang         |
| Memiliki tanah lebih dari 10 ha                        | 0 orang         |
| Jumlah total penduduk                                  | 0 orang         |
| <b>B. ASET SARANA TRANSPORTASI UMUM</b>                |                 |
|                                                        | 0 orang- 0 unit |
| <b>C. ASET SARANA PRODUKSI</b>                         |                 |
| Memiliki penggilingan padi                             | 0 orang         |
| Memiliki traktor                                       | 0 orang         |
| Memiliki pabrik pengolahan hasil pertanian             | 0 orang         |
| Memiliki kapal penangkap ikan                          | 0 orang         |
| Memiliki alat pengolahan hasil perikanan               | 0 orang         |
| Memiliki alat pengolahan hasil peternakan              | 0 orang         |
| Memiliki alat pengolahan hasil perkebunan              | 0 orang         |
| Memiliki alat pengolahan hasil hutan                   | 0 orang         |
| Memiliki alat produksi dan pengolah hasil pertambangan | 0 orang         |

|                                                                                                |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Memiliki alat produksi dan pengolah hasil pariwisata                                           | 0 orang |
| Memiliki alat produksi dan pengolah hasil industri jasa perdagangan                            | 0 orang |
| Memiliki alat produksi dan pengolah hasil industri kerajinan keluarga skala kecil dan menengah | 0 orang |
| Memiliki alat produksi dan pengolahan hasil industri migas                                     | 0 orang |
|                                                                                                |         |
| <b>D. ASET PERUMAHAN RUMAH MENURUT DINDING</b>                                                 |         |
|                                                                                                |         |
| <b>RUMAH MENURUT LANTAI</b>                                                                    |         |
|                                                                                                |         |
| <b>RUMAH MENURUT ATAP</b>                                                                      |         |

## VII. PEMILIKAN ASET EKONOMI LAINNYA

|                                                    |              |
|----------------------------------------------------|--------------|
| Jumlah keluarga memiliki TV dan elektronik lainnya | 235 Keluarga |
|----------------------------------------------------|--------------|

## VIII. PENDIDIKAN MASYARAKAT

|                                                                        |          |
|------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>A. Tingkat Pendidikan Penduduk</b>                                  |          |
| Jumlah penduduk buta aksara dan huruf latin                            | 30 orang |
| Jumlah penduduk usia 3-6 tahun yang masuk TK dan Kelompok Bermain Anak | 17 orang |
| Jumlah anak dan penduduk cacat fisik dan mental                        | 3 orang  |
| Jumlah penduduk sedang SD/ sederajat                                   | 90 orang |
| Jumlah penduduk tamat SD/ sederajat                                    | 19 orang |
| Jumlah penduduk tidak tamat SD/ sederajat                              | 50 orang |
| Jumlah penduduk sedang SLTP/ sederajat                                 | 35 orang |
| Jumlah penduduk tamat SLTP/ sederajat                                  | 25 orang |
| Jumlah penduduk sedang SLTA/ sederajat                                 | 35 orang |
| Jumlah penduduk tidak tamat SLTP/ Sederajat                            | 19 orang |
| Jumlah penduduk tamat SLTA/ Sederajat                                  | 75 orang |
| Jumlah penduduk sedang D-1                                             | 0 orang  |
| Jumlah penduduk tamat D-1                                              | 0 orang  |
| Jumlah penduduk sedang D-2                                             | 0 orang  |
| Jumlah penduduk tamat D-2                                              | 0 orang  |
| Jumlah penduduk sedang D-3                                             | 6 orang  |
| Jumlah penduduk tamat D-3                                              | 12 orang |
| Jumlah penduduk sedang S-1                                             | 15 orang |
| Jumlah penduduk tamat S-1                                              | 11 orang |
| Jumlah penduduk sedang S-2                                             | 0 orang  |
| Jumlah penduduk tamat S-2                                              | 0 orang  |
| Jumlah penduduk tamat S-3                                              | 0 orang  |
| Jumlah penduduk sedang SLB A                                           | 0 orang  |
| Jumlah penduduk tamat SLB A                                            | 0 orang  |
| Jumlah penduduk sedang SLB B                                           | 0 orang  |
| Jumlah penduduk tamat SLB B                                            | 0 orang  |
| Jumlah penduduk sedang SLB C                                           | 0 orang  |
| Jumlah penduduk tamat SLB C                                            | 0 orang  |
| Jumlah penduduk cacat fisik dan mental                                 | 2 orang  |
|                                                                        |          |
| <b>B. Wajib belajar 9 tahun</b>                                        |          |
| 1. Jumlah penduduk usia 7-15 tahun                                     | orang    |
| 2. Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang masih sekolah                  | orang    |
| 3. Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang tidak sekolah                  | orang    |
|                                                                        |          |
| <b>C. Rasio Guru dan Murid</b>                                         |          |
| 1. Jumlah guru TK dan kelompok bermain anak                            | orang    |
| 2. Jumlah siswa TK dan kelompok bermain anak                           | orang    |
| 3. Jumlah guru SD dan sederajat                                        | orang    |
| 4. Jumlah siswa SD dan sederajat                                       | orang    |
| 5. Jumlah guru SLTP dan sederajat                                      | orang    |
| 6. Jumlah siswa SLTP dan sederajat                                     | orang    |
| 7. Jumlah guru SLTA/ sederajat                                         | orang    |
| 8. Jumlah siswa SLTA/ sederajat                                        | orang    |
| 9. Jumlah siswa SLB                                                    | orang    |
| 10. Jumlah guru SLB                                                    | orang    |
|                                                                        |          |
| <b>D. Kelembagaan Pendidikan Masyarakat</b>                            |          |

|                                                 |          |
|-------------------------------------------------|----------|
| Jumlah perpustakaan desa/kelurahan              | unit     |
| Jumlah taman bacaan desa/kelurahan              | unit     |
| Jumlah perpustakaan keliling                    | unit     |
| Jumlah sanggar belajar                          | unit     |
| Jumlah kegiatan lembaga pendidikan luar sekolah | kegiatan |
| Jumlah kelompok belajar Paket A                 | kelompok |
| Jumlah peserta ujian Paket A                    | orang    |
| Jumlah kelompok belajar Paket B                 | kelompok |
| Jumlah Peserta ujian Paket B                    | orang    |
| Jumlah kelompok belajar Paket C                 | kelompok |
| Jumlah peserta ujian Paket C                    | orang    |
| Jumlah lembaga kursus keterampilan              | unit     |
| Jumlah peserta kursus keterampilan              | orang    |
|                                                 |          |

## IX. KESEHATAN MASYARAKAT

|                                                                                   |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>A. Kualitas Ibu Hamil</b>                                                      |            |
| Jumlah ibu hamil                                                                  | 8 orang    |
| Jumlah ibu hamil periksa di Posyandu                                              | 8 orang    |
| Jumlah ibu hamil periksa di Puskesmas                                             | 0 orang    |
| Jumlah ibu hamil periksa di Rumah Sakit                                           | 0 orang    |
| Jumlah ibu hamil periksa di Dokter Praktek                                        | 0 orang    |
| Jumlah ibu hamil periksa di Bidan Praktek                                         | 0 orang    |
| Jumlah ibu hamil periksa di Dukun Terlatih                                        | 0 orang    |
| Jumlah kematian ibu hamil                                                         | 0 orang    |
| Jumlah ibu hamil melahirkan                                                       | 8 orang    |
| Jumlah ibu nifas                                                                  | 0 orang    |
| Jumlah kematian ibu nifas                                                         | 0 orang    |
| Jumlah ibu nifas hidup                                                            | 0 orang    |
|                                                                                   |            |
| <b>B. Kualitas Bayi</b>                                                           |            |
| Jumlah keguguran kandungan                                                        | 0 orang    |
| Jumlah bayi lahir                                                                 | 8 orang    |
| Jumlah bayi lahir mati                                                            | 0 orang    |
| Jumlah bayi lahir hidup                                                           | 8 orang    |
| Jumlah bayi mati usia 0 – 1 bulan                                                 | 0 orang    |
| Jumlah bayi mati usia 1 – 12 bulan                                                | 0 orang    |
| Jumlah bayi lahir berat kurang dari 2,5 kg                                        | 0 orang    |
| Jumlah bayi 0-5 tahun hidup yang menderita kelainan organ tubuh, fisik dan mental | 0 orang    |
|                                                                                   |            |
| <b>C. Kualitas Persalinan</b>                                                     |            |
| <b>Tempat Persalinan</b>                                                          |            |
| Tempat persalinan Rumah Sakit Umum                                                | 0 unit     |
| Tempat persalinan Rumah Bersalin                                                  | 0 unit     |
| Tempat persalinan Puskesmas                                                       | 0 unit     |
| Tempat persalinan Polindes                                                        | 0 unit     |
| Tempat persalinan Balai Kesehatan Ibu Anak                                        | 0 unit     |
| Tempat persalinan rumah praktek bidan                                             | 0 unit     |
| Tempat praktek dokter                                                             | 0 unit     |
| Rumah dukun                                                                       | 0 unit     |
| Rumah sendiri                                                                     | 0 unit     |
|                                                                                   |            |
| <b>Pertolongan Persalinan</b>                                                     |            |
| Jumlah Persalinan ditolong Dokter                                                 | 0 tindakan |
| Jumlah persalinan ditolong bidan                                                  | 0 tindakan |
| Jumlah persalinan ditolong perawat                                                | 0 tindakan |
| Jumlah persalinan ditolong dukun bersalin                                         | 0 tindakan |
| Jumlah persalinan ditolong keluarga                                               | 0 tindakan |
|                                                                                   |            |
| <b>D. Cakupan Imunisasi</b>                                                       |            |
| Jumlah Bayi usia 2 bulan                                                          | 0 orang    |
| Jumlah bayi 2 bulan Imunisasi DPT-1, BCG dan Polio -1                             | 0 orang    |
| Jumlah bayi usia 3 bulan                                                          | 0 orang    |
| Jumlah bayi 3 bulan yang imunisasi DPT-2 dan Polio-2                              | 0 orang    |
| Jumlah bayi usia 4 bulan                                                          | 0 orang    |

|                                                                                |            |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Jumlah bayi 4 bulan yang imunisasi DPT-3 dan Polio-3                           | 0 orang    |
| Jumlah bayi 9 bulan                                                            | 0 orang    |
| Jumlah bayi 9 bulan yang imunisasi campak                                      | 0 orang    |
| Jumlah bayi yang sudah imunisasi cacar                                         | 0 orang    |
|                                                                                |            |
| <b>E. Perkembangan Pasangan Usia Subur dan KB</b>                              |            |
| Pasangan Usia Subur                                                            |            |
| Jumlah remaja putri usia 12 – 17 tahun                                         | 0 orang    |
| Jumlah perempuan usia subur 15 – 49 tahun                                      | 0 orang    |
| Jumlah wanita kawin muda usia kurang dari 16 tahun                             | 0 orang    |
| Jumlah pasangan usia subur                                                     | 0 pasangan |
|                                                                                |            |
| <b>Keluarga Berencana</b>                                                      |            |
| Jumlah akseptor KB                                                             | 0 orang    |
| Jumlah pengguna alat kontrasepsi suntik                                        | 0 orang    |
| Jumlah pengguna metode kontrasepsi spiral                                      | 0 orang    |
| Jumlah pengguna alat kontrasepsi kondom                                        | 0 orang    |
| Jumlah pengguna metode kontrasepsi pil                                         | 0 orang    |
| Jumlah pengguna metode vasektomi                                               | 0 orang    |
| Jumlah pengguna metode kontrasepsi tubektomi                                   | 0 orang    |
| Jumlah pengguna metode KB Kelender/KB Alamiah                                  | 0 orang    |
| Jumlah pengguna metode KB obat tradisional                                     | 0 orang    |
| Jumlah pengguna alat kontrasepsi metode xxx                                    | 0 orang    |
| Jumlah PUS yang tidak menggunakan metode KB                                    | 0 orang    |
|                                                                                |            |
| <b>F. Wabah Penyakit</b>                                                       |            |
|                                                                                |            |
| <b>G. Angka Harapan Hidup</b>                                                  |            |
| Angka harapan hidup penduduk Desa/Kelurahan                                    | 0,00 Tahun |
| Angka harapan hidup penduduk Kabupaten/Kota                                    | 0,00 Tahun |
| Angka Harapan Hidup Provinsi                                                   | 0,00 Tahun |
| Angka harapan Hidup Nasional                                                   | 0,00 Tahun |
|                                                                                |            |
| <b>H. Cakupan pemenuhan kebutuhan air bersih</b>                               |            |
| 1. Jumlah keluarga menggunakan sumur gali                                      | 0 Keluarga |
| 2. Jumlah keluarga pelanggan PAM                                               | 0 Keluarga |
| 3. Jumlah keluarga menggunakan Penampung Air Hujan                             | 0 Keluarga |
| 4. Jumlah keluarga menggunakan sumur pompa                                     | 0 Keluarga |
| 5. Jumlah keluarga menggunakan perpipaan air kran                              | 0 Keluarga |
| 6. Jumlah keluarga menggunakan hidran umum                                     | 0 Keluarga |
| 7. Jumlah keluarga menggunakan air sungai                                      | 0 Keluarga |
| 8. Jumlah keluarga menggunakan embung                                          | 0 Keluarga |
| 9. Jumlah keluarga yang menggunakan mata air                                   | 0 Keluarga |
| 10. Jumlah keluarga yang tidak mendapatkan akses air minum dari air laut       | 0 Keluarga |
| 11. Jumlah keluarga yang tidak mendapatkan akses air minum dari sumber di atas | 0 Keluarga |
| Total jumlah keluarga                                                          | 0 Keluarga |
|                                                                                |            |
| <b>I. Perilaku hidup bersih dan sehat</b>                                      |            |
| Kebiasaan buang air besar                                                      |            |
| Jumlah keluarga memiliki WC yang sehat                                         | 0 Keluarga |
| Jumlah keluarga memiliki WC yang kurang memenuhi standar kesehatan             | 0 Keluarga |
| Jumlah keluarga biasa buang air besar di sungai/parit/kebun/hutan              | 0 Keluarga |
| Jumlah keluarga yang menggunakan fasilitas MCK umum                            | 0 Keluarga |
|                                                                                |            |
| <b>Pola makan</b>                                                              |            |
| Kebiasaan penduduk makan dlm sehari 1 kali                                     |            |
| Kebiasaan penduduk makan sehari 2 kali                                         |            |
| Kebiasaan penduduk makan sehari 3 kali                                         |            |
| Kebiasaan penduduk makan sehari lebih dari 3 kali                              |            |
| Penduduk yang belum tentu sehari makan 1 kali                                  |            |
|                                                                                |            |
| <b>Kebiasaan berobat bila sakit</b>                                            |            |
| Dukun Terlatih                                                                 |            |
| Dokter/puskesmas/mantri kesehatan/perawat/bidan/posyandu                       |            |
| Obat tradisional dari dukun pengobatan alternatif                              |            |

|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| Paranormal                             |         |
| Obat tradisional dari keluarga sendiri |         |
| Tidak diobati                          |         |
|                                        |         |
| <b>J. Status Gizi Balita</b>           |         |
| Jumlah Balita                          | 0 orang |
| Jumlah Balita bergizi buruk            | 0 orang |
| Jumlah Balita bergizi baik             | 0 orang |
| Jumlah Balita bergizi kurang           | 0 orang |
| Jumlah Balita bergizi lebih            | 0 orang |
|                                        |         |

|                                            |                         |                    |
|--------------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| <b>K. Jumlah Penderita Sakit tahun ini</b> |                         |                    |
| <b>Jenis penyakit</b>                      | <b>Jumlah penderita</b> | <b>Di rawat di</b> |

|                                                                  |             |
|------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>L. Perkembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat</b> |             |
| Jumlah MCK Umum                                                  | 0 unit      |
| Jumlah Posyandu                                                  | 0 unit      |
| Jumlah kader Posyandu aktif                                      | 0 orang     |
| Jumlah pembina Posyandu                                          | 0 orang     |
| Jumlah Dasawisma                                                 | 0 Dasawisma |
| Jumlah pengurus Dasa Wisma aktif                                 | 0 orang     |
| Jumlah kader bina keluarga balita aktif                          | 0 orang     |
| Jumlah petugas lapangan keluarga berencana aktif                 | 0 orang     |
| Buku rencana kegiatan Posyandu                                   |             |
| Buku data pengunjung Posyandu                                    |             |
| Buku kegiatan pelayanan Posyandu                                 |             |
| Buku administrasi Posyandu lainnya                               | 0 jenis     |
| Jumlah kegiatan Posyandu                                         | 0 jenis     |
| Jumlah kader kesehatan lainnya                                   | 0 orang     |
| Jumlah kegiatan pengobatan gratis                                | 0 jenis     |
| Jumlah kegiatan pemberantasan sarang nyamuk/PSN                  | 0 jenis     |
| Jumlah kegiatan pembersihan lingkungan                           | 0 jenis     |
| Lainnya                                                          | 0 jenis     |
|                                                                  |             |

## X. KEAMANAN DAN KETERTIBAN

|                                                                                                                 |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>A. Konflik SARA</b>                                                                                          |         |
| Kasus konflik pada tahun ini                                                                                    | 0 kasus |
| Kasus konflik SARA pada tahun ini                                                                               | 0 kasus |
| Jumlah kasus pertengkaran dan atau perkelahian antar tetangga                                                   | 0 kasus |
| Jumlah kasus pertengkaran dan atau perkelahian antar RT/RW                                                      | 0 kasus |
| Jumlah konflik antar masyarakat pendatang dengan penduduk asli                                                  | 0 kasus |
| Jumlah kasus antar kelompok masyarakat dalam desa/kelurahan dengan kelompok masyarakat dari desa/kelurahan lain | 0 kasus |
| Jumlah konflik antara masyarakat dengan pemerintah                                                              | 0 kasus |
| Jumlah kerugian material akibat konflik antara masyarakat dan pemerintah                                        | Rp 0,00 |
| Jumlah korban jiwa akibat konflik antara masyarakat dengan pemerintah                                           | 0 orang |
| Jumlah konflik antara masyarakat dengan perusahaan                                                              | 0 orang |
| Jumlah korban jiwa akibat konflik antara masyarakat dengan perusahaan                                           | 0 orang |
| Jumlah kerugian material akibat konflik antara masyarakat dan pemerintah                                        | 0 orang |
| Jumlah konflik politik antara masyarakat dengan lembaga politik                                                 | 0 kasus |
| Jumlah korban jiwa akibat konflik politik antara masyarakat dengan lembaga politik                              | 0 orang |
| Jumlah kerugian material akibat konflik politik antara masyarakat dengan lembaga politik                        | Rp 0,00 |
| Jumlah prasarana dan sarana yang rusak/terbakar akibat konflik Sara                                             | 0 buah  |
| Jumlah rumah penduduk yang rusak/terbakar akibat konflik Sara                                                   | 0 rumah |
| Jumlah korban luka akibat konflik Sara                                                                          | 0 orang |
| Jumlah korban meninggal akibat konflik Sara                                                                     | 0 orang |
| Jumlah janda akibat konflik Sara                                                                                | 0 orang |
| Jumlah anak yatim akibat konflik Sara                                                                           | 0 orang |
| Jumlah pelaku konflik yang diadili atau diproses secara hukum                                                   | 0 orang |
|                                                                                                                 |         |
| <b>B. Perkelahian</b>                                                                                           |         |
| Kasus perkelahian yang terjadi pada tahun ini                                                                   | 0 kasus |
| Kasus perkelahian yang menimbulkan korban jiwa                                                                  | 0 kasus |
| Kasus perkelahian yang menimbulkan luka parah                                                                   | 0 kasus |
| Kasus perkelahian yang menimbulkan kerugian material                                                            | 0 kasus |

|                                                                                                                       |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Jumlah pelaku konflik yang diadili atau diproses secara hukum                                                         | 0 orang   |
|                                                                                                                       |           |
| <b>C. Pencurian</b>                                                                                                   |           |
| Kasus pencurian dan perampokan yang terjadi tahun ini                                                                 | 1 kasus   |
| Kasus pencurian/perampokan yang korbannya penduduk Desa/Kelurahan setempat                                            | 1 kasus   |
| Kasus pencurian/perampokan yang pelakunya penduduk Desa/Kelurahan setempat                                            | 0 kasus   |
| Jumlah pencurian dengan kekerasan senjata api                                                                         | 0 kasus   |
| Jumlah pelaku yang diadili atau diproses secara hukum                                                                 | 0 orang   |
|                                                                                                                       |           |
| <b>D. Penjarahan dan Penyerobotan Tanah</b>                                                                           |           |
| Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban dan pelakunya penduduk setempat                            | 0 kasus   |
| Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban penduduk setempat tetapi pelakunya bukan penduduk setempat | 0 kasus   |
| Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban bukan penduduk setempat tetapi pelakunya penduduk setempat | 0 kasus   |
| Jumlah pelaku yang diadili atau diproses secara hukum                                                                 | 0 orang   |
|                                                                                                                       |           |
| <b>E. Perjudian, Penipuan dan Penggelapan</b>                                                                         |           |
| Jumlah penduduk yang memiliki kebiasaan berjudi                                                                       | 15 orang  |
| Jenis perjudian yang ada di Desa/Kelurahan ini                                                                        | 2 orang   |
| Jumlah kasus penipuan dan atau penggelapan                                                                            | 0 orang   |
| Jumlah kasus sengketa warisan, jual beli dan utang piutang                                                            | 0 orang   |
|                                                                                                                       |           |
| <b>F. Pemakaian Miras dan Narkoba</b>                                                                                 |           |
| Jumlah warung/toko yang menyediakan Miras                                                                             | 0 buah    |
| Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Miras                                                                               | 25 orang  |
| Jumlah kasus mabuk akibat Miras                                                                                       | 0 kasus   |
| Jumlah pengedar Narkoba                                                                                               | 0 orang   |
| Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Narkoba                                                                             | 0 orang   |
| Jumlah kasus mabuk/teler akibat Narkoba                                                                               | 0 kasus   |
| Jumlah kasus kematian akibat Narkoba                                                                                  | 0 kasus   |
| Jumlah pelaku Miras yang diadili atau diproses secara hukum                                                           | 0 orang   |
| Jumlah pelaku Narkoba yang diadili atau diproses secara hukum                                                         | 0 orang   |
|                                                                                                                       |           |
| <b>G. Prostitusi</b>                                                                                                  |           |
| Jumlah penduduk pekerja pramu nikmat                                                                                  | 0 orang   |
| Lokalisasi prostitusi                                                                                                 | Tidak Ada |
| Jumlah tempat yang menyediakan wanita pramunikmat secara terselubung (warung remang-remang, panti pijat, hotel, dll)  | 0 buah    |
| Jumlah kasus/konflik akibat maraknya praktek prostitusi                                                               | 0 kasus   |
| Jumlah pembinaan pelaku prostitusi                                                                                    | 0 kali    |
| Jumlah penertiban penyediaan tempat prostitusi                                                                        | 0 kali    |
|                                                                                                                       |           |
| <b>H. Pembunuhan</b>                                                                                                  |           |
| Jumlah kasus pembunuhan pada tahun ini                                                                                | 0 orang   |
| Jumlah kasus pembunuhan dengan korban penduduk Desa/Kelurahan setempat                                                | 0 kasus   |
| Jumlah kasus pembunuhan dengan pelaku penduduk setempat                                                               | 0 kasus   |
| Jumlah kasus bunuh diri                                                                                               | 0 kasus   |
| Jumlah Kasus Yang Diproses secara hukum                                                                               | 0 kasus   |
|                                                                                                                       |           |
| <b>I. Penculikan</b>                                                                                                  |           |
| Jumlah kasus penculikan                                                                                               | 0 kasus   |
| Jumlah kasus penculikan dengan korban penduduk Desa/Kelurahan setempat                                                | 0 kasus   |
| Jumlah kasus penculikan dengan pelaku penduduk setempat                                                               | 0 kasus   |
| Jumlah kasus penculikan yang diselesaikan secara hukum                                                                | 0 kasus   |
|                                                                                                                       |           |
| <b>J. Kejahatan seksual</b>                                                                                           |           |
| Jumlah kasus perkosaan pada tahun ini                                                                                 | 0 kasus   |
| Jumlah kasus perkosaan anak pada tahun ini                                                                            | 0 kasus   |
| Jumlah kasus kehamilan di luar nikah menurut hukum negara                                                             | 0 kasus   |
| Jumlah kasus kehamilan di luar nikah menurut hukum adat                                                               | 0 kasus   |
| Jumlah tempat penampungan/persewaan kamar bagi pekerja seks                                                           | 0 unit    |
|                                                                                                                       |           |
| <b>K. Masalah Kesejahteraan Sosial</b>                                                                                |           |
| Jumlah gelandangan                                                                                                    | 0 orang   |
| Jumlah pengemis jalanan                                                                                               | 0 orang   |
| Jumlah anak jalanan dan terlantar                                                                                     | 0 orang   |

|                                                                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Jumlah manusia lanjut usia terlantar                                                                            | 0 orang   |
| Jumlah orang gila/stress/cacat mental                                                                           | 3 orang   |
| Jumlah orang cacat fisik                                                                                        | 4 orang   |
| Jumlah orang kelainan kulit                                                                                     | 1 orang   |
| Jumlah orang yang tidur di kolong jembatan/emperan                                                              | 0 orang   |
| Jumlah rumah dan kawasan kumuh                                                                                  | 0 unit    |
| Jumlah panti jompo                                                                                              | 0 unit    |
| Jumlah panti asuhan anak                                                                                        | 0 unit    |
| Jumlah rumah singgah anak jalanan                                                                               | 0 unit    |
| Jumlah penghuni jalur hijau dan taman kota                                                                      | 0 orang   |
| Jumlah penghuni bantaran sungai                                                                                 | 820 orang |
| Jumlah penghuni pinggiran rel kereta api                                                                        | 0 orang   |
| Jumlah penghuni liar di lahan dan fasilitas umum lainnya                                                        | 0 orang   |
| Jumlah anggota kelompok masyarakat/suku/keluarga terasing, terisolir, terlantar dan primitif                    | 0 orang   |
| Jumlah anak yatim usia 0–18 tahun                                                                               | 4 orang   |
| Jumlah anak piatu 0 - 18 tahun                                                                                  | 1 orang   |
| Jumlah anak yatim piatu 0–18 tahun                                                                              | 1 orang   |
| Jumlah janda                                                                                                    | 16 orang  |
| Jumlah duda                                                                                                     | 0 orang   |
| Jumlah anak, remaja, preman dan pengangguran                                                                    | 0 orang   |
| Jumlah anak usia 7-12 tahun yang tidak sekolah di SD/ sederajat                                                 | 0 orang   |
| Jumlah anak usia 13-15 tahun yang tidak sekolah di SLTP/ sederajat                                              | 0 orang   |
| Jumlah anak usia 15-18 tahun yang tidak sekolah di SLTA/ sederajat                                              | 0 orang   |
| Jumlah anak yang bekerja membantu keluarga menghasilkan uang                                                    | 0 orang   |
| Jumlah perempuan yang menjadi kepala keluarga                                                                   | 11 orang  |
| Jumlah penduduk eks NAPI                                                                                        | 2 orang   |
| Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana banjir                                                          | 820 orang |
| Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana gunung berapi                                                   | 0 orang   |
| Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana tsunami                                                         | 0 orang   |
| Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana gempa bumi                                                      | 0 orang   |
| Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana kebakaran rumah                                                 | 0 orang   |
| Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana kekeringan                                                      | 20 orang  |
| Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana tanah longsor                                                   | 0 orang   |
| Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana kebakaran hutan                                                 | 0 orang   |
| Jumlah penduduk rawan bencana kelaparan                                                                         | 0 orang   |
| Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan air bersih                                                              | 820 orang |
| Jumlah penduduk tinggal di daerah lahan kritis dan tandus                                                       | 0 orang   |
| Jumlah penduduk tinggal di kawasan padat penduduk dan kumuh                                                     | 0 orang   |
| Jumlah warga pendatang yang tidak memiliki keterangan penduduk                                                  | 0 orang   |
| Jumlah warga pendatang dan atau pekerja musiman                                                                 | 23 orang  |
|                                                                                                                 |           |
| <b>L. Kekerasan Dalam Rumah Tangga</b>                                                                          |           |
| Jumlah kasus kekerasan suami terhadap istri                                                                     | kasus     |
| Jumlah kasus kekerasan istri terhadap suami                                                                     | kasus     |
| Jumlah kasus kekerasan orang tua terhadap anak                                                                  | kasus     |
| Jumlah kasus kekerasan anak terhadap orang tua                                                                  | kasus     |
| Jumlah kasus kekerasan kepala keluarga terhadap anggota keluarga lainnya                                        | kasus     |
|                                                                                                                 |           |
| <b>M. Teror dan Intimidasi</b>                                                                                  |           |
| Jumlah kasus intimidasi dan atau teror anggota masyarakat dari pihak dalam desa dan kelurahan                   | kasus     |
| Jumlah kasus intimidasi dan atau teror anggota masyarakat dari pihak luar desa atau kelurahan                   | kasus     |
| Jumlah kasus selebaran gelap dan atau isu yang bersifat teror dan ancaman untuk menimbulkan ketakutan penduduk  | kasus     |
| Jumlah kasus terorisme yang terjadi di desa dan kelurahan tahun ini                                             | kasus     |
| Jumlah kasus hasutan dan pemaksaan kehendak kelompok tertentu kepada masyarakat                                 | kasus     |
| Jumlah penyelesaian kasus teror dan intimidasi serta hasutan di masyarakat baik secara adat maupun hukum formal | kasus     |
|                                                                                                                 |           |
| <b>N. Pelembagaan Sistem Keamanan Lingkungan Semesta</b>                                                        |           |
| Organisasi Siskamling                                                                                           |           |
| Organisasi Pertahanan Sipil dan Perlindungan Masyarakat                                                         |           |
| Jumlah RT atau sebutan lainnya yang ada Siskamling/Pos Ronda                                                    | RT        |
| Jumlah anggota Hansip dan Linmas                                                                                | orang     |
| Jadwal kegiatan Siskamling dan Pos Ronda                                                                        |           |
| Buku anggota Hansip dan Linmas                                                                                  | jenis     |
| Jumlah kelompok Satuan Pengamanan (SATPAM) swasta                                                               | unit      |
| Jumlah pembinaan Siskamling oleh Pengurus dan Kades/Lurah                                                       | kegiatan  |
| Jumlah Pos Jaga Induk Desa/Kelurahan                                                                            | Pos       |
|                                                                                                                 |           |

# **XI. KEDAULATAN POLITIK MASYARAKAT**

|                                                                                                                                                                                             |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>A. Kesadaran berpemerintahan, berbangsa dan bernegara</b>                                                                                                                                |            |
| Jenis kegiatan pemantapan nilai Ideologi Pancasila sebagai Dasar Negara                                                                                                                     | 1 jenis    |
| Jumlah kegiatan pemantapan nilai Ideologi Pancasila sebagai Dasar Negara                                                                                                                    | 1 kegiatan |
| Jenis-jenis kegiatan pemantapan nilai Bhinneka Tunggal Ika                                                                                                                                  | 1 jenis    |
| Jumlah kegiatan pemantapan nilai Bhinneka Tunggal Ika                                                                                                                                       | 1 kegiatan |
| Jenis kegiatan pemantapan kesatuan bangsa lainnya                                                                                                                                           | 1 jenis    |
| Jumlah kegiatan pemantapan kesatuan bangsa lainnya                                                                                                                                          | 1 kegiatan |
| Jumlah kasus warga desa/kelurahan yang minta suaka/lari ke luar negeri                                                                                                                      | 0 kasus    |
| Jumlah warga yang melintasi perbatasan ke negara tetangga secara resmi                                                                                                                      | 0 orang    |
| Jumlah warga yang melintasi perbatasan negara tetangga secara tidak resmi                                                                                                                   | 0 orang    |
| Jumlah kasus pertempuran atau perlawanan antar kelompok pengacau keamanan di perbatasan negara dengan warga/aparat dari desa/kelurahan                                                      | 0 kasus    |
| Jumlah serangan terhadap fasilitas umum dan milik masyarakat oleh kelompok pengacau di desa/kelurahan perbatasan negara tetangga                                                            | 0 kasus    |
| Jumlah kasus yang diklasifikasikan merongrong keutuhan NKRI dan Kesatuan Bangsa Indonesia di desa/kelurahan tahun ini                                                                       | 0 kasus    |
| Jumlah korban manusia baik luka maupun tewas serta korban materi lainnya akibat serangan kelompok pengacau keamanan                                                                         | 0 kasus    |
| Jumlah masalah ketenagakerjaan di perbatasan antar negara yang terjadi tahun ini                                                                                                            | 0 kasus    |
| Jumlah kasus kejahatan pencurian, penjarahan, perampokan dan intimidasi serta teror yang terjadi di desa/kelurahan perbatasan antar negara                                                  | 0 kasus    |
| Jumlah sengketa perbatasan antar negara yang terjadi desa/kelurahan ini                                                                                                                     | 0 kasus    |
| Jumlah kasus sengketa perbatasan yang terjadi baik antar desa/kelurahan dalam kecamatan maupun antar kecamatan, antar kabupaten/kota dan desa/kelurahan antar provinsi.                     | 0 kasus    |
| Jumlah kasus yang terkait dengan perbatasan antar negara yang dilaporkan Kepala Desa/Lurah ke pemerintah tingkat atasnya                                                                    | 0 kasus    |
| Jumlah kasus yang mengarah kepada tindakan disintegrasi bangsa dan pengingkaran NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika yang difasilitasi penyelesaiannya oleh Kepala Desa/Lurah | 0 kasus    |
| Jumlah kasus penangkapan nelayan asing di wilayah perairan desa/kelurahan                                                                                                                   | 0 kasus    |
| Jumlah kasus penangkapan nelayan/petani/peternak/ pekebun/perambah hutan asal desa/kelurahan di perairan dan daratan wilayah negara lain                                                    | 0 kasus    |
| <b>B. Kesadaran membayar Pajak dan Retribusi</b>                                                                                                                                            |            |
| Jenis pajak yang dipungut sebagai kewenangan dan atau tugas desa/kelurahan                                                                                                                  | 1 jenis    |
| Jumlah Wajib Pajak                                                                                                                                                                          | 0 orang    |
| Target PBB                                                                                                                                                                                  | Rp 0,00    |
| Realisasi PBB                                                                                                                                                                               | 100,00 %   |
| Jumlah Tindakan terhadap penunggak PBB                                                                                                                                                      | 0 tindakan |
| Jenis Retribusi yang dipungut sebagai tugas dan kewenangan desa/kelurahan                                                                                                                   | 1 jenis    |
| Jumlah wajib retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan                                                                                                                         | 0 orang    |
| Target retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan                                                                                                                               | Rp 0,00    |
| Realisasi retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan                                                                                                                            | 0,00 %     |
| Jenis pungutan resmi lainnya di Desa/Kelurahan                                                                                                                                              | 0 jenis    |
| Target pungutan resmi tingkat desa/kelurahan                                                                                                                                                | Rp 0,00    |
| Realisasi pungutan resmi di desa/kelurahan                                                                                                                                                  | 1,00 %     |
| Jumlah kasus pungutan liar                                                                                                                                                                  | 0 kasus    |
| Jumlah penyelesaian kasus pungutan liar                                                                                                                                                     | 0 kasus    |
| <b>C. Partisipasi Politik</b>                                                                                                                                                               |            |
| <b>1. Jumlah Partai Politik dan Pemilihan Umum</b>                                                                                                                                          |            |
| Jumlah penduduk yang memiliki hak pilih                                                                                                                                                     | 608 orang  |
| Jumlah penduduk yang menggunakan hak pilih pada pemilu legislatif yang lalu                                                                                                                 | 580 orang  |
| Jumlah perempuan dari penduduk desa/kelurahan ini yang aktif di partai politik                                                                                                              | 1 orang    |
| Jumlah partai politik yang memiliki pengurus sampai di Desa/Kelurahan ini                                                                                                                   | 3 partai   |
| Jumlah partai politik yang mempunyai kantor di wilayah desa/kelurahan ini                                                                                                                   | 0 partai   |
| Jumlah penduduk yang menjadi pengurus partai politik dari desa/kelurahan                                                                                                                    | 0 orang    |
| Jumlah penduduk yang dipilih dalam Pemilu Legislatif yang lalu                                                                                                                              | 0 orang    |
| Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam pemilihan presiden/wakil                                                                                                                    | 0 pemilih  |
| <b>2. Pemilihan Kepala Daerah</b>                                                                                                                                                           |            |
| Jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih                                                                                                                                                    | 0 orang    |
| Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam pemilu Bupati/Walikota lalu                                                                                                                 | 0 pemilih  |
| Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam pemilu Gubernur yang lalu                                                                                                                   | 0 pemilih  |
| <b>3. Penentuan Kepala Desa/Lurah dan Perangkat Desa/Kelurahan</b>                                                                                                                          |            |

|                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Penentuan Jabatan Kepala Desa                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Penentuan Sekretaris Desa                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Penentuan Perangkat Desa termasuk Kepala Dusun                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Masa jabatan Kepala Desa                                                                                                                                                         | 0 tahun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Penentuan Jabatan Lurah dan Perangkat Kelurahan termasuk Kepala Lingkungan                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>4. Pemilihan BPD</b>                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Jumlah anggota BPD                                                                                                                                                               | 0 orang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Penentuan anggota BPD                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pimpinan BPD                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pemilikan kantor/ruang kerja BPD                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Anggaran untuk BPD                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Produk keputusan BPD tahun ini                                                                                                                                                   | 1. Peraturan Desa 0 buah<br>2. Permintaan keterangan dari Kepala Desa 0 kali<br>3. Rancangan Peraturan Desa. 0 buah<br>4. Menyalurkan aspirasi masyarakat 0 kali<br>5. Menyatakan pendapat kepada Kepala Desa 0 kali<br>6. Menyampaikan usul dan pendapat kepada Kepala Desa 0 kali<br>7. Mengevaluasi efektivitas pelaksanaan APB Desa 0 kali |
| <b>5. Pemilihan dan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan</b>                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Keberadaan organisasi lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dasar hukum keberadaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/LKD                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Jumlah organisasi anggota lembaga kemasyarakatan desa termasuk RT, RW, PKK, LKMD/K, LPM, Karang Taruna, Bumdes, Lembaga Adat, Kelompok Tani dan lembaga lainnya sesuai ketentuan | 0 unit organisasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Dasar hukum pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan/LKK                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Jumlah organisasi anggota lembaga kemasyarakatan kelurahan                                                                                                                       | 0 unit organisasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Pemilihan pengurus LKD/LKK                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pemilihan pengurus organisasi anggota LKD/LKK termasuk PKK, LPM/LKMD/K, Karang Taruna, RT, RW, Bumdes, lembaga adat, kelompok tani dan organisasi anggota LKD/LKK lainnya        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Implementasi tugas, fungsi dan kewajiban LKD/LKK                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Jumlah kegiatan yang dilaksanakan LKD/LKK                                                                                                                                        | 0 kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Fungsi, tugas dan kewajiban lembaga kemasyarakatan yang dijalankan organisasi anggota LKD/LKK                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Jumlah kegiatan lembaga kemasyarakatan yang dijalankan organisasi anggota LKD/LKK                                                                                                | 0 kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Alokasi anggaran untuk LKD/LKK                                                                                                                                                   | Tidak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Alokasi anggaran untuk organisasi anggota LKD/LKK termasuk PKK, PM/LKMD/K, Karang Taruna, RT, RW, kelompok tani dan organisasi lainnya                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kantor dan ruangan kerja untuk LKD/LKK                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dukungan pembiayaan, personil dan ATK untuk Sekretariat LKD/LKK dari APB-Desa dan Anggaran Kelurahan/APBD                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Realisasi program kerja organisasi anggota LKD/LKK                                                                                                                               | 0,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Keberadaan Alat kelengkapan organisasi anggota LKD/LKK termasuk Dasawisma dan Pokja, Bidang, Seksi, Urusan, dan terisi tidaknya struktur organisasi anggota LKD/LKK              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kegiatan administrasi dan Ketatausahaan LKD/LKK                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

#### C. PERANSERTA MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN

|                                                                                                                                          |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>1. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan/ Musrenbangdes/ kelurahan</b>                                                    |         |
| Jumlah musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Desa/Kelurahan yang dilakukan pada tahun ini, termasuk di tingkat dusun dan lingkungan | 2 kali  |
| Jumlah kehadiran masyarakat dalam setiap kali musyawarah tingkat dusun/lingkungan dan desa/kelurahan                                     | 50,00 % |
| Jumlah peserta laki-laki dalam Musrenbang di desa/kelurahan                                                                              | 40,00 % |
| Jumlah peserta perempuan dalam Musrenbang di desa dan kelurahan                                                                          | 10,00 % |

|                                                                                                                                                                                                                                               |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Jumlah Musyawarah Antar Desa dalam perencanaan pembangunan yang dikoordinasikan Kecamatan                                                                                                                                                     | 1,00 %       |
| Penggunaan Profil Desa/Kelurahan sebagai sumber data dasar yang digunakan dalam perencanaan pembangunan desa dan Forum Musrenbang Partisipatif                                                                                                | Ya           |
| Penggunaan data BPS dan data sektoral dalam perencanaan pembangunan partisipatif dan Musrenbang di desa dan Kelurahan                                                                                                                         |              |
| Pelibatan masyarakat dalam pemutakhiran data profil desa dan kelurahan sebagai bahan dalam Musrenbang partisipatif                                                                                                                            | Ya           |
| Usulan masyarakat yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa dan Kelurahan                                                                                                                                                                     | 4,00 %       |
| Usulan Pemerintah Desa dan Kelurahan yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa/Kelurahan dan dimuat dalam RAPB-Desa                                                                                                                           | 3,00 %       |
| Usulan rencana kerja program dan kegiatan dari pemerintah kabupaten/kota/provinsi dan pusat yang dibahas saat Musrenbang dan disetujui untuk dilaksanakan di desa dan kelurahan oleh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan     | 0,00 %       |
| Usulan rencana kerja pemerintah tingkat atas yang ditolak dalam Musrenbangdes/kel                                                                                                                                                             | 0 kegiatan   |
| Pemilikan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa/Kelurahan (RKPD/K)                                                                                                                                                                           | Tidak        |
| Pemilikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/Kelurahan (RPJMD/K)                                                                                                                                                                        | Ada          |
| Pemilikan dokumen hasil Musrenbang tingkat Desa dan Kelurahan yang diusulkan ke pemerintah tingkat atas untuk dibiayai dari APBD Kab/Kota, APBD Provinsi dan APBN maupun sumber biaya dari perusahaan swasta yang investasi di desa/kelurahan | Ada          |
| Jumlah kegiatan yang diusulkan masyarakat melalui forum Musrenbangdes/kel yang tidak direalisasikan dalam APB-Desa, APB-Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi                                                                                    | 3 . kegiatan |
| Jumlah kegiatan yang diusulkan masyarakat melalui forum Musrenbangdes/kel yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan hasil Musrenbang                                                                                                            | 0 . kegiatan |
|                                                                                                                                                                                                                                               |              |
| <b>2. Peranserta masyarakat dalam Pelaksanaan dan Pelestarian Hasil Pembangunan</b>                                                                                                                                                           |              |
| Jumlah masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan fisik di desa dan kelurahan sesuai hasil Musrenbang                                                                                                                             | 30,00 %      |
| Jumlah penduduk yang dilibatkan dalam pelaksanaan proyek padat karya oleh pengelola proyek yang ditunjuk pemerintah desa/kelurahan atau kabupaten/kota                                                                                        | 25,00 %      |
| Jumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang sudah ada sesuai ketentuan dalam APB-Desa                                                                                                    | 7 kegiatan   |
| Jumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga tanpa melibatkan masyarakat sesuai ketentuan dalam APB-Daerah                                                                                                                             | 0 kegiatan   |
| Jumlah kegiatan yang masuk desa/kelurahan di luar yang telah direncanakan dan disepakati masyarakat saat Musrenbang                                                                                                                           | 0,00 %       |
| Usulan masyarakat yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa dan Kelurahan                                                                                                                                                                     | 3,00 %       |
| Usulan Pemerintah Desa dan Kelurahan yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa/Kelurahan                                                                                                                                                      | 7,00 %       |
| Usulan rencana kerja program dan kegiatan dari pemerintah kabupaten/kota/provinsi dan pusat yang dibahas saat Musrenbang dan disetujui untuk dilaksanakan di desa dan kelurahan oleh masyarakat                                               | 0,00 %       |
| Penyelenggaraan musyawarah desa/kelurahan untuk menerima, memelihara dan melestarikan hasil pembangunan yang sudah ada                                                                                                                        | Ada          |
| Pelaksanaan kegiatan dari masyarakat untuk menyelesaikan atau menindaklanjuti kegiatan yang belum diselesaikan oleh pelaksana sebelumnya.                                                                                                     | Tidak        |
| Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilaporkan masyarakat atau lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan kepada Kepala Desa/Lurah                                                                                     | 0 kasus      |
| Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan di tingkat desa/kelurahan                                                                                                                                                 | 0 kasus      |
| Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang diselesaikan secara hukum                                                                                                                                      | 0 kasus      |
| Jenis kegiatan masyarakat untuk melestarikan hasil pembangunan yang dikoordinasikan pemerintah desa/kelurahan                                                                                                                                 | 0 Jenis      |
| Jumlah kegiatan yang didanai dari APB-Desa dan swadaya masyarakat di kelurahan                                                                                                                                                                | 7 kegiatan   |
| Jumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai dari APB Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                             | 0 kegiatan   |
| Jumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai dari APBD Provinsi                                                                                                                                                                         | 0 kegiatan   |
| Jumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai APBN                                                                                                                                                                                       | 0 kegiatan   |
|                                                                                                                                                                                                                                               |              |
| <b>3. Semangat Kegotongroyongan Penduduk</b>                                                                                                                                                                                                  |              |
| Jumlah kelompok arisan                                                                                                                                                                                                                        | 3 buah       |
| Jumlah penduduk menjadi orang tua asuh                                                                                                                                                                                                        | 0 orang      |
| Ada tidaknya dana sehat                                                                                                                                                                                                                       | Tidak        |
| Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pembangunan rumah                                                                                                                                                          | Ada          |
| Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pengolahan tanah                                                                                                                                                           | Ada          |
| Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pembiayaan pendidikan anak sekolah/kuliah/kursus                                                                                                                           | Tidak        |
| Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemeliharaan fasilitas umum dan fasilitas sosial/prasarana dan sarana                                                                                                      | Tidak        |
| Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemberian modal usaha                                                                                                                                                      | Tidak        |
| Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pengerjaan sawah dan kebun                                                                                                                                                 | Tidak        |
| Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam penangkapan ikan dan usaha peternakan lainnya                                                                                                                              | Tidak        |
| Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam menjaga ketertiban, ketentraman dan keamanan                                                                                                                               | Ada          |
| Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam peristiwa kematian                                                                                                                                                         | Ada          |
| Ada tidaknya kegiatan gotong royong menjaga kebersihan Desa/Kelurahan                                                                                                                                                                         | Ada          |
| Ada tidaknya kegiatan gotong royong membangun jalan/jembatan/saluran air/irigasi                                                                                                                                                              | Tidak        |
| Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemberantasan sarang nyamuk dan kesehatan lingkungan lainnya                                                                                                               | Tidak        |
|                                                                                                                                                                                                                                               |              |
| <b>4. Adat Istiadat</b>                                                                                                                                                                                                                       |              |

|                                                                                                                                                                             |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Adat istiadat dalam perkawinan                                                                                                                                              | Aktif         |
| Adat istiadat dalam kelahiran anak                                                                                                                                          | Aktif         |
| Adat istiadat dalam upacara kematian                                                                                                                                        | Aktif         |
| Adat istiadat dalam pengelolaan hutan                                                                                                                                       | Tidak         |
| Adat istiadat dalam tanah pertanian                                                                                                                                         | Tidak         |
| Adat istiadat dalam pengelolaan laut/pantai                                                                                                                                 | Tidak         |
| Adat istiadat dalam memecahkan konflik warga                                                                                                                                | Aktif         |
| Adat istiadat dalam menjauhkan bala penyakit dan bencana alam                                                                                                               | Pernah Ada    |
| Adat istiadat dalam memulihkan hubungan antara alam semesta dengan manusia dan lingkungannya                                                                                | Tidak         |
| Adat istiadat dalam penanggulangan kemiskinanbagi keluarga tidak mampu/fakir miskin/terlantar                                                                               | Tidak         |
|                                                                                                                                                                             |               |
| <b>5. Sikap Dan Mental Masyarakat</b>                                                                                                                                       |               |
| Jumlah jenis pungutan liar dari anak gelandangan di sudut jalanan                                                                                                           | 0 jenis       |
| Jumlah jenis pungutan liar di terminal, pelabuhan dan pasar                                                                                                                 | 0 jenis       |
| Peminta-minta sumbangan perorangan dari rumah ke rumah                                                                                                                      | 0             |
| Peminta-minta sumbangan terorganisasi dari rumah ke rumah                                                                                                                   | 0             |
| Semakin berkembang praktek jalan pintas dalam mencari uang secara gampang walau tidak halal                                                                                 | 0             |
| Jenis pungutan dari RT atau sebutan lain kepada warga                                                                                                                       | 0 jenis       |
| Jenis pungutan dari RW atau sebutan lain kepada warga                                                                                                                       | 0 jenis       |
| Jenis pungutan dari desa/kelurahan kepada warga                                                                                                                             | 0 jenis       |
| Kasus aparat RT/RW atau sebutan lainnya di desa dan kelurahan yang dipecat kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya.                                              | 0 kasus       |
| Dipindah karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya                                                                                                          | 0 kasus       |
| Diberhentikan dengan hormat karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya                                                                                       | 0 kasus       |
| Dimutasi karena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya                                                                                                               | 0 kasus       |
| Banyak masyarakat yang memberikan biaya lebih dari yang ditentukan sebagai uang rokok atau ucapan terima kasih dalam proses pelayanan administrasi di kantor desa/kelurahan | 0             |
| Banyak warga yang ingin mendapatkan pelayanan gratis dari aparat desa/kelurahan                                                                                             | 1             |
| Banyak penduduk yang mengeluhkan memburuknya kualitas pelayanan kepada masyarakat                                                                                           | 0             |
| Banyak kegiatan yang bersifat hiburan dan rekreasi yang diinisiatifi masyarakat sendiri                                                                                     | 1             |
| Masyarakat agak kurang toleran dengan keberadaan kelompok masyarakat dari unsur etnis, agama dan kelompok kepentingan lain                                                  | 0             |
|                                                                                                                                                                             |               |
| <b>Etos Kerja Penduduk</b>                                                                                                                                                  |               |
| Luas Wilayah Desa/Kelurahan sangat luas                                                                                                                                     | 1             |
| Banyak lahan terlantar yang tidak dikelola pemiliknya/petani berdasi                                                                                                        | 1             |
| Banyak lahan pekarangan di sekitar perumahan yang tidak dimanfaatkan                                                                                                        | 1             |
| Banyak lahan tidur milik masyarakat yang tidak dimanfaatkan                                                                                                                 | 1             |
| Jumlah petani pada musim gagal tanam/panen yang pasrah dan tidak mencari pekerjaan lain                                                                                     | 1             |
| Jumlah nelayan pada musim tidak melaut yang memanfaatkan keterampilan/keahlian lainnya untuk mencari pekerjaan lain                                                         | 0             |
| Banyak penduduk yang mencari pekerjaan di luar desa/kelurahan tetapi masih dalam wilayah kabupaten/kota                                                                     | 1             |
| Banyak penduduk yang mencari pekerjaan di kota besar lainnya                                                                                                                | 1             |
| Kebiasaan masyarakat merayakan pesta dengan menghadirkan undangan yang banyak                                                                                               | 1             |
| Masyarakat sering mendatangi kantor desa dan lurah menuntut penyediaan kebutuhan dasar sembilan bahan pokok pada saat kelaparan dan kekeringan                              | 0             |
| Kebiasaan masyarakat untuk mencari/mengumpulkan bahan makanan pengganti beras/jagung pada saat rawan pangan/kelaparan/gagal panen                                           | 0             |
| Kebiasaan pemotongan hewan dalam jumlah besar untuk pesta adat dan perayaan upacara tertentu                                                                                | 1             |
| Kebiasaan masyarakat berdemonstrasi/protes terhadap kebijakan pemerintah                                                                                                    | 0             |
| Kebiasaan masyarakat terprovokasi karena isu-isu yang menyesatkan                                                                                                           | 1             |
| Kebiasaan masyarakat bermusyawarah untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan                                                                             | 2             |
| Lebih banyak masyarakat yang diam/masabodoh/apatis ketika ada persoalan yang terjadi di lingkungan sekitarnya                                                               | 0             |
| Kebiasaan aparat pemerintah desa/kelurahan terlebih di tingkat RT, RW, Dusun dan Lingkungan yang kurang menanggapi kesulitan yang dihadapi masyarakat                       | 0             |
|                                                                                                                                                                             |               |
| <b>XII. LEMBAGA KEMASYARAKATAN</b>                                                                                                                                          |               |
| <b>A. LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN</b>                                                                                                                             |               |
| Keberadaan organisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan/LKD/LK                                                                                                      | Tidak         |
| Jumlah kegiatan                                                                                                                                                             | Jenis         |
|                                                                                                                                                                             |               |
| <b>B. ORGANISASI ANGGOTA LEMBAGA KEMASYARAKATAN</b>                                                                                                                         |               |
| <b>1. Posyandu</b>                                                                                                                                                          | <b>Ada</b>    |
| Kepengurusan                                                                                                                                                                | Ada dan Aktif |
| Buku Administrasi                                                                                                                                                           | 5             |
| Jumlah kegiatan                                                                                                                                                             | 3 Jenis       |
|                                                                                                                                                                             |               |
| <b>2. Rukun Tetangga (RT)</b>                                                                                                                                               | <b>Ada</b>    |

|                                                                                      |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Kepengurusan                                                                         | Ada dan Aktif |
| Buku Administrasi                                                                    | 3             |
| Jumlah kegiatan                                                                      | 3 Jenis       |
|                                                                                      |               |
| <b>3. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)</b>                                            | <b>Ada</b>    |
| Kepengurusan                                                                         | Ada dan Aktif |
| Buku Administrasi                                                                    | 0             |
| Jumlah kegiatan                                                                      | 0 Jenis       |
|                                                                                      |               |
| <b>4. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)</b>                              | <b>Ada</b>    |
| Kepengurusan                                                                         | Ada dan Aktif |
| Buku Administrasi                                                                    | 7             |
| Jumlah kegiatan                                                                      | 2 Jenis       |
|                                                                                      |               |
| <b>5. Karang Taruna</b>                                                              | <b>Ada</b>    |
| Kepengurusan                                                                         | Ada dan Aktif |
| Buku Administrasi                                                                    | 0             |
| Jumlah kegiatan                                                                      | 0 Jenis       |
|                                                                                      |               |
| <b>6. Lembaga Adat</b>                                                               | <b>Ada</b>    |
| Kepengurusan                                                                         | Ada dan Aktif |
| Buku Administrasi                                                                    | 0             |
| Jumlah kegiatan                                                                      | 0 Jenis       |
|                                                                                      |               |
| Dasar hukum pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa                                  |               |
| Dasar hukum pembentukan lembaga kemasyarakatan kelurahan                             |               |
| Dasar hukum pembentukan organisasi anggota lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan |               |
|                                                                                      |               |

### XIII. PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN

|                                                                                                                                                                    |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>A. APB-Desa dan Anggaran Kelurahan</b>                                                                                                                          |                   |
| Jumlah anggaran belanja dan penerimaan Desa/Kelurahan tahun ini                                                                                                    | Rp 971.125.690,00 |
| Sumber Anggaran                                                                                                                                                    |                   |
| APBD Kabupaten/Kota                                                                                                                                                | Rp 0,00           |
| Bantuan Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                                                                  | Rp 283.356.000,00 |
| Bantuan Pemerintah Provinsi                                                                                                                                        | Rp 0,00           |
| Bantuan Pemerintah Pusat                                                                                                                                           | Rp 664.082.000,00 |
| Pendapatan Asli Desa                                                                                                                                               | Rp 0,00           |
| Swadaya Masyarakat Desa dan Kelurahan                                                                                                                              | Rp 0,00           |
| Alokasi Dana Desa                                                                                                                                                  | Rp 9.320.028,00   |
| Sumber Pendapatan dari Perusahaan yang ada di desa/kelurahan                                                                                                       | Rp 0,00           |
| Sumber pendapatan lain yang sah dan tidakmengikat                                                                                                                  | Rp 14.367.662,00  |
| Jumlah Belanja Publik/belanja pembangunan                                                                                                                          | Rp 560.171.560,00 |
| Jumlah Belanja Aparatur/pegawai                                                                                                                                    | Rp 410.954.130,00 |
|                                                                                                                                                                    |                   |
| <b>B. Pertanggungjawaban Kepala Desa/Lurah</b>                                                                                                                     |                   |
| Penyampaian laporan keterangan pertanggung jawaban Kepala Desa kepada BPD                                                                                          | 1                 |
| Jumlah informasi yang disampaikan kepala desa dan lurah tentang laporan penyelenggaraan tugas, wewenang, hak dan kewajiban kepala desa dan lurah kepada masyarakat | 2 jenis           |
| Status laporan keterangan pertanggungjawaban kepala Desa                                                                                                           | 1                 |
| Laporan kinerja penyelenggaraan tugas, wewenang, kewajiban dan hak kepala desa dan lurah kepada Bupati/Walikota                                                    | 1                 |
| Jumlah jenis media informasi kinerja kepala desa dan lurah kepada masyarakat                                                                                       | 1 jenis           |
| Jumlah kasus pengaduan masyarakat terhadap masalah pembangunan, pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan yang disampaikan kepada kepala desa/lurah                   | 0 kasus           |
| Jumlah kasus pengaduan masyarakat terhadap masalah pembangunan, pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan yang diselesaikan kepala desa/lurah                         | 0 kasus           |
|                                                                                                                                                                    |                   |
| <b>C. Prasarana Dan Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan</b>                                                                                                   |                   |
| <b>1. PEMERINTAH DESA/KELURAHAN</b>                                                                                                                                |                   |
| Gedung Kantor                                                                                                                                                      | -                 |
| Jumlah ruang kerja                                                                                                                                                 | Ruang             |
| Balai Desa/Kelurahan/sejenisnya                                                                                                                                    |                   |
| Listrik                                                                                                                                                            |                   |
| Air bersih                                                                                                                                                         |                   |

|                                                               |       |
|---------------------------------------------------------------|-------|
| Telepon                                                       |       |
|                                                               |       |
| <b>1.A. Inventaris dan Alat tulis kantor</b>                  |       |
| Jumlah mesin tik                                              | buah  |
| Jumlah meja                                                   | buah  |
| Jumlah kursi                                                  | buah  |
| Jumlah almari arsip                                           | buah  |
| Komputer                                                      | unit  |
| Mesin fax                                                     | unit  |
| Kendaraan Dinas Lurah/Kepala Desa                             | unit  |
|                                                               |       |
| <b>1. B. Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan</b>         |       |
| Buku Data Peraturan Desa                                      |       |
| Buku Keputusan Kepala Desa/Lurah                              |       |
| Buku Administrasi Kependudukan                                |       |
| Buku Data Inventaris                                          |       |
| Buku Data Aparat                                              |       |
| Buku Data Tanah Kas Desa                                      |       |
| Buku Administrasi Pajak dan Retribusi                         |       |
| Buku Data Tanah                                               |       |
| Buku Laporan Pengaduan Masyarakat                             |       |
| Buku Agenda Ekspedisi                                         |       |
| Buku Profil Desa dan Kelurahan                                |       |
| Buku Data Induk Penduduk                                      |       |
| Buku Data Mutasi Penduduk                                     |       |
| Buku Rekapitulasi Penduduk Akhir Bulan                        |       |
| Buku Registrasi Pelayanan Penduduk                            |       |
| Buku Data Penduduk Sementara                                  |       |
| Buku Anggaran Penerimaan                                      |       |
| Buku Anggaran Pengeluaran Pegawai/Pembangunan                 |       |
| Buku Kas Umum                                                 |       |
| Buku Kas Pembantu Penerimaan                                  |       |
| Buku Kas Pembantu Pengeluaran Rutin/Pembangunan               |       |
| Buku Data Lembaga Kemasyarakatan                              |       |
|                                                               |       |
| <b>2. PRASARANA DAN SARANA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA/BPD</b> |       |
| Gedung Kantor                                                 |       |
| Jumlah ruang kerja                                            | Ruang |
| Balai BPD                                                     | -     |
| Listrik                                                       |       |
| Air bersih                                                    |       |
| Telepon                                                       |       |
|                                                               |       |
| <b>2.A. Inventaris dan Alat tulis kantor</b>                  |       |
| Jumlah mesin tik                                              | buah  |
| Jumlah meja                                                   | buah  |
| Jumlah kursi                                                  | buah  |
| Jumlah almari arsip                                           | buah  |
| Komputer                                                      | unit  |
| Mesin fax                                                     | unit  |
|                                                               |       |
| <b>2.B. Administrasi BPD</b>                                  |       |
| Buku-buku administrasi kegiatan BPD                           |       |
| Buku Buku Administrasi Keanggotaan                            |       |
| Buku kegiatan BPD                                             |       |
| Buku himpunan peraturan desa                                  |       |
| Buku Lainnya                                                  |       |
|                                                               |       |
| <b>3. PRASARANA DAN SARANA DUSUN/LINGKUNGAN/SEBUTAN LAIN</b>  |       |
| Gedung kantor atau Balai Pertemuan                            |       |
| Alat tulis kantor                                             |       |
| Barang inventaris                                             | Jenis |
| Buku administrasi                                             | Jenis |
| Jenis kegiatan                                                | Jenis |
| Jumlah pengurus                                               | Orang |
| Jumlah ruang kerja                                            | Ruang |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| <b>D. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| <b>1. Jenis Pembinaan Pemerintah Pusat kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| Pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan desa, kelurahan, lembaga kemasyarakatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ada        |
| Pedoman dan standar bantuan pembiayaan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota kepada desa dan kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ada        |
| Pedoman umum administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ada        |
| Pedoman dan standar tanda jabatan, pakaian dinas dan atribut bagi Kepala Desa, Lurah dan PerangkatDesa/Kelurahan serta BPD                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ada        |
| Pedoman pendidikan dan pelatihan bagi pemerintahan desa, kelurahan, lembaga kemasyarakatan dan perangkat masing-masing                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ada        |
| Jumlah bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pemerintahan desa dan kelurahan serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 kegiatan |
| Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 kegiatan |
| Penelitian dan pengkajian penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 kegiatan |
| Jumlah kegiatan yang terkait dengan upaya percepatan atau akselerasi pembangunan desa dan kelurahan dalam bidang ekonomi keluarga, penanganan bencana, penanggulangan kemiskinan, percepatan keberdayaan masyarakat, peningkatan prasarana dan sarana pedesaan/kelurahan, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pengembangan sosial budaya masyarakat di desa dan kelurahan yang dibiayai APBN | 5 jenis    |
| Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 kali     |
| Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 kali     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| <b>2. Pembinaan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari provinsi ke desa/kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| Pedoman bantuan keuangan dari provinsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| Fasilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berskala provinsi                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kegiatan   |
| Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | jenis      |
| Kegiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD Provinsi untuk desa dan kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | jenis      |
| Kegiatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | jenis      |
| Kegiatan penyediaan sarana dan prasarana desa dan kelurahan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                                                           | jenis      |
| Kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan pengembangan teknologi tepat guna yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                                                   | jenis      |
| Kegiatan pengembangan sosial budaya masyarakat Pedoman pendataan dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                                                               | jenis      |
| Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | jenis      |
| Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan                                                                                                                                                                                                                                                             | jenis      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| <b>3. Pembinaan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| Pelimpahan tugas Bupati/Walikota kepada Lurah dan Kepala Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 jenis    |
| Penetapan pengaturan kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 jenis    |
| Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari kabupaten/kota kepada desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 jenis    |
| Pedoman teknis penyusunan peraturan desa, peraturan kepala desa, keputusan Lurah dan peraturan daerah kepada kepala desa dan lurah.                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 jenis    |
| Pedoman teknis penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif serta pengembangan lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 jenis    |
| Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan                                                                                                                                                                                                                                  | 0 jenis    |
| Penetapan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 jenis    |
| Fasilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 jenis    |
| Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berskala kabupaten/kota                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 jenis    |
| Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD kabupaten/kota yang masuk desa dan kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 jenis    |
| Kegiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD kabupaten/kota untuk desa dan kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 jenis    |
| Kegiatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD kabupaten/kota di desa dan kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 jenis    |
| Fasilitasi penetapan pedoman dan standar tanda jabatan, pakaian dinas dan atribut bagi Kepala Desa, Lurah, Perangkat Desa/Kelurahan dan BPD                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 jenis    |
| Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan                                                                                                                                                                                                                                  | 0 jenis    |
| Pedoman pendataan dan pendayagunaan profil desa dan kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 jenis    |
| Program dan kegiatan pemeliharaan motivasi desa/kelurahan berprestasi pascaperlombaan desa dan kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 jenis    |
| Pemberian penghargaan atas prestasi yang dicapai pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 jenis    |
| Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 kasus    |

|                                                                                                                                                                                                                         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Mengawasi pengelolaan keuangan desa serta anggaran kelurahan dan pendayagunaan aset pemerintahan desa, badan usaha milik desa dan sumber pendapatan daerah yang dikelola lurah                                          | 1 kasus |
|                                                                                                                                                                                                                         |         |
| <b>4. Pembinaan dan Pengawasan Camat kepada Desa/Kelurahan</b>                                                                                                                                                          |         |
| Jumlah Kegiatan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa                                                                                                                                          | 1 kali  |
| Jumlah Kegiatan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa dan kelurahan                                                                                                                                            | 1 kali  |
| Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa serta anggaran kelurahan                                                                                                                               | 1 kali  |
| Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan urusan otonomi daerah kabupaten/kota yang diserahkan kepada desa                                                                                                                 | 1 kali  |
| Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang- undangan                                                                                                                                                        | 1 kali  |
| Fasilitasi penyediaan data dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan                                                                                                                                             | 1 kali  |
| Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan tugas, wewenang, fungsi, hak dan kewajiban kepala desa, BPD, Lurah dan lembaga kemasyarakatan                                                                                    | 1 kali  |
| Jumlah kegiatan fasilitasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum                                                                                                                                       | 1 kali  |
| Fasilitasi penataan, penguatan dan efektivitas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan                                                                                        | 1 kali  |
| Jumlah kegiatan fasilitasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan serta pengembangan dan pelestarian hasil pembangunan.                                                    | 1 kali  |
| Fasilitasi kerjasama antar desa/kelurahan dan kerjasama desa/kelurahan dengan pihak ketiga                                                                                                                              | 0 kali  |
| Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat                                                                                                                                     | 1 kali  |
| Jumlah kegiatan pemeliharaan motivasi bagi desa dan kelurahan juara perlombaan dan pasca perlombaan                                                                                                                     | 0 kali  |
| Jumlah kegiatan fasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan dengan organisasi anggota lembaga kemasyarakatan serta dengan pihak ketiga sebagai mitra percepatan keberdayaan masyarakat | 0 kali  |
| Jumlah kegiatan fasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan dan organisasi anggotanya                                                                                                      | 0 kali  |
| Jumlah kegiatan koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan.                                                                                                            | 0 kali  |
|                                                                                                                                                                                                                         |         |

KAB. SINTANG, 2 Juni 2022  
 GANDIS HULU  
 Kecamatan Dedai  
 Kabupaten KAB. SINTANG

AHMAD USTOHORI  
 Kepala Desa

Tembusan :  
 1. Camat Dedai  
 2. Bupati KAB. SINTANG  
 3. Arsip